DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS iii
DAFTAR ISI v

Bab I
PENDAHULUAN 1

Bab II
PERLINDUNGAN SAKSI DI BEBERAPA NEGARA 13
2.1 Amerika Serikat 13
2.2 Afrika Selatan 20
2.3 Jerman 25
2.4 Indonesia 38

Bab III
PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 41
3.1 Peraturan Hukum yang Terkait dengan Perlindungan Terhadap Saksi di Indonesia 41
3.1.1 KUUH Pidana 46
3.1.2 Kitab UU Hukam Acara Pidana 49
3.1.3 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 52
3.1.4 UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika 54
3.1.5 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 57
3.1.6 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 61
3.1.7 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 62
3.1.8 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 71
3.1.9 UU No.15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. 77
3.1.10 UU No.23 Tahun 2004 tentang Pernghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 79
3.1.11 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 87
3.1.12 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 94
3.2 Beban Ganda dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban 97
3.3 Saksi yang Dilindungi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban 99

3.4 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 106
3.5 Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan 106

Bab IV
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MENURUT HAP DAN HAM 107
4.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 107
4.2 Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia 111
4.3 Kerangka Pikir 113
4.4 Beberapa Pengertian 118

Bab V
PERLINDUNGAAN SAKSI HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN 121

Bab VI
PERLINDUNGAAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA 169
5.1 Peranan Saksi dan Korban 169
5.2 Kedudukan Saksi dan Korban 179
5.3 Saksi Non Korban 185
5.4 Hak-hak Saksi dan Korban 187

Bab VII
PENERAPAN ASAS AQUALITY BEFORE THE LAW DALAM UU NO.13 TAHUN 2006 199
6.1 Syarat Perlindungan Saksi dan Korban 201
6.2 Peranan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) 206
6.3 Sanksi 224

Bab VIII
SISTEM PERADILAN PIDANA 239
7.1 Arti Peradilan 241
7.2 Sejarah Singkat Kedudukan dan Peranan Badan Peradilan 243
7.3 Sistem Peradilan Pidana Indonesia 247
7.4 Kajian Sosiologis terhadap Peradilan Pidana 254

Bab IX
PENUTUP 259

DAFTAR PUSTAKA 261